

## TAJUK RENCANA

### Gerakan Wisata Bersepeda DIY

**KOMUNITAS** bersepeda di Yogya mendesak, agar gerakan bersepeda Kota Yogya mendapat perhatian serius. Dalam hal ini, adalah perlindungan baik dari sisi kenyamanan atau perlindungan hukum. Kebijakan yang berkelanjutan ini, dimunculkan dalam FGD khusus DPRD Kota Yogya, Segi Segawe Reborn, Jogja Lebih Bike dan Pusat Studi Transportasi Logistik (Pustral) UGM (KR 16/1).

Menurut pandangan kita, komunitas bersepeda yang akhir-akhir ini marak di sejumlah kota memang perlu mendapat perhatian serius. Sejak pandemi Covid-19 itu melanda dunia, kegiatan bersepeda sangat marak. Bukan hanya di Yogya, tetapi merata hampir seluruh Indonesia, juga banyak negara. Rekreasi, silaturahmi, dan sehat adalah semboyan yang banyak digunakan para goweser ini. Maka orang yang semula tidak pernah bersepeda, kini bisa kita lihat banyak berseliweran jalan-jalan di Yogya atau di sekitarnya. Olahraga ini bukan hanya didominasi anak muda. Namun kita bisa saksikan orang tua, lelaki perempuan dan anak-anak melenggang di jalan raya saat pagi, pada waktu berangkat ke kantor atau sekolah.

Yogyakarta sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata, untuk sementara ini domestik, sebenarnya sangat klop jika memanfaatkan wisata sepeda sebagai salah satu bidang yang lebih serius digarap. Yogya punya potensi melakukan itu baik lokasi atau rute, jalanan yang menantang atau yang santai. Efeknya adalah kuliner, tempat-tempat titik kumpul bersepeda tumbuh di berbagai tempat. Dampak inilah yang sangat berpengaruh terhadap UMKM bidang kuliner. Kita lihat potensi lokasi DIY, untuk beberapa jenis 'cycling tourism' sebenarnya bisa.

Kulonprogo atau kota Yogya punya untuk jenis road bike, XC (Cross Country), XC Trail, seli (sepeda lipat), BMX, All Mountain / Enduro, sampai

Down Hill. Jenis tersebut yang sering kali untuk membedakan spek sepeda dan juga trek yang dilalui. Bantul. Sleman dan Kulonprogo misalnya, punya arena Down Hill atau BMX All Mountain yang menarik bahkan di Bantul pernah digunakan untuk down tingkat nasional. Trek-trek favorit itulah yang kemudian memunculkan nama seperti jalur Luna Maya, karena pernah digunakan oleh artis Luna Maya ketika gowes di Kupnprogo.

DIY punya jalur gunung dan pantai, selain desa wisata yang akan menjadi 'surga' nya para goweser. Di Desa Wisata Srikeminut Bantul misalnya, malah warga setempat mengeruk keuntungan dengan menyewakan sepeda, yang digunakan menyusuri jalanan sungai dan pinggiran desa wisata. Selanjutnya warga menyediakan makanan tradisional khas Bantul.

Pada hari-hari libur, suasana desa tersebut sangat menguntungkan bagi warga dan pengunjung. Maka DIY sangat memerhatikan strategi atau langkah-langkah untuk mengembangkan wisata sepeda. Misalnya tentang analisa destinasi trek sepeda, segementasi goweser sampai kemudian membangun branding. Bahwa Yogya tempo dulu terkenal sebagai kota sepeda, mengapa tidak dimunculkan kembali kejayaan itu?

Di sisi lain menurut survei Pustral UGM, saat ini udara kota Yogya dalam kondisi sedang. Kendaraan bermotor penyumbang gas emisi terbesar yang mempengaruhi kualitas udara di kota, termasuk Yogya. Karena itu tentunya bukan hanya kota Yogya, namun wilayah lain melihat wisata sepeda.

Tentu perlu dukungan dari pemerintah. Misalnya dengan peraturan walikota atau bupati, yang mengatur jalur sepeda. Atau mulai membangun fasilitas-fasilitas olahraga sepeda, tergantung lokasinya. Termasuk fasilitas parkir di perkotaan dan tiap-tiap kantor. (\*\*\*)

# Memahami Urgensi Bank Tanah

Sutaryono

**PADA** penghujung 2021 secara resmi pemerintah memiliki Bank Tanah. Kelahiran bank tanah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Terlepas dari polemik pasca Putusan MK terkait dengan UU Cipta Kerja, naskah ini mencoba mengelaborasi urgensi pembentukan bank tanah.

Pada dasarnya gagasan perlunya pembentukan Bank Tanah sudah ada hampir satu dekade yang lalu, yakni melalui dokumen *white paper* Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional (Bappenas, 2013). Perlunya pembentukan bank tanah dikarenakan intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat. Sementara terbatasnya ketersediaan tanah, harga tanah yang selalu meningkat, serta kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah, utamanya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Disisi lain badan usaha swasta sudah mempraktikkan 'bank tanah' dalam bentuk penguasaan tanah dengan skala luas sebagai pencadangan tanah, yang dapat dimaknai sebagai praktik spekulasi yang di dalamnya ada unsur penelantaran tanah.

### Terhambat

Seperti kita ketahui bersama bahwa berbagai pembangunan untuk kepentingan umum, utamanya pembangunan infrastruktur seringkali terhambat pada proses pengadaan tanahnya. Terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut disebabkan oleh: (a) lokasi tidak sesuai dengan RTRW; (b) tidak semua masyarakat terdampak setuju; (c) Hak Atas Tanah tidak jelas (objek & subjeknya); (d) ketidaksepakatan dalam ganti rugi; (e) kurang terbukanya informasi; (f) munculnya spekulasi; (g) proses penetapan lokasi yang tidak *clear & clean*; (h) keterbatasan pembiayaan. Berbagai persoalan tersebut menjadikan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menjadi terganggu. Bahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis pun menjadi terhambat.

Berdasarkan hal-hal di atas maka keberadaan bank tanah menjadi sebuah kebutuhan yang perlu diprioritaskan.



KR-JOKO SANTOSO

nakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan operasional Bank Tanah. Sehingga penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersedia, tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan PP 64/2021 disebutkan bahwa Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank Tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Kewenangan khusus bank tanah adalah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk: (a) kepentingan umum; (b) kepentingan sosial; (c) kepentingan pembangunan nasional; (d) pemerataan ekonomi; (e) konsolidasi lahan; dan (f) reforma agraria.

Secara normatif Bank Tanah diberikan tugas untuk: (a) melakukan perencanaan

kegiatan; (b) melakukan perolehan tanah; (c) melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah secara langsung; (d) melakukan pengelolaan tanah dari kegiatan pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian tanah; (e) melakukan pemanfaatan tanah melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain; dan (f) melakukan pendistribusian tanah.

### Penetapan Pemerintah

Objek tanah yang dapat dikuasai oleh bank tanah adalah tanah hasil penetapan pemerintah yang berasal dari tanah negara, seperti: (a) tanah bekas hak; (b) kawasan dan tanah telantar; (c) tanah pelepasan kawasan hutan; (d) tanah timbul; (e) tanah hasil reklamasi; (f) tanah bekas tambang; (g) tanah pulau-pulau kecil; (h) tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang; dan (i) tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya. Disamping itu juga dapat berasal dari tanah-tanah pemerintah, badan hukum, badan usaha ataupun dari tanah masyarakat. Tanah-tanah tersebut dikuasai oleh bank tanah melalui berbagai cara perolehan seperti pembelian, penerimaan hibah/sumbangan, tukar menukar, pelepasan hak maupun melalui perolehan bentuk lain yang sah.

Pada akhirnya, apabila bank tanah ini dapat beroperasi secara baik. Maka jaminan ketersediaan tanah untuk berbagai pembangunan, kepentingan umum, kepentingan sosial, maupun untuk kepentingan pemerataan ekonomi ataupun terkait dengan agenda reforma dapat diwujudkan. □

*\*) Dr Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fak. Geografi UGM.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

## Memahami Fungsi Pendidikan

**MEMASUKI** semester kedua tahun pelajaran 2021/2022 ini dunia pendidikan diperbolehkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) seratus persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kebijakan tersebut dapat menjawab keresahan dan kegelisahan banyak pihak atas kekhawatiran lost generation sebagai dampak ikutan dari pandemi Covid-19. Dengan demikian, dunia pendidikan diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Kita tentu menyadari, bahwa menatap dan mempersiapkan generasi masa depan bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Sebab, tanpa panduan dan peran serta pendidikan kita akan kehilangan arah dan tujuan, terutama dalam mempersiapkan lahirnya para pemimpin terbaik negeri yang kita cintai ini. Di sinilah arti pentingnya kita mengingat dan memahami kembali fungsi pendidikan.

Drs Agus Taufiq MPd mengutip dari para pakar, minimal ada empat fungsi pendidikan yang banyak disepakati. Pertama, fungsi individuasi. Perlu ditegaskan di sini bahwa istilah individuasi berbeda dengan individualisasi. Individuasi merujuk pada proses untuk menjadi diri sendiri sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan pribadi yang lain. Tujuan utama individuasi ialah pemanfaatan segenap potensi seseorang dalam mencapai prestasi terbaiknya tanpa tergantung kepada orang lain. Singkatnya, proses seorang individu menjadi dirinya sendiri. Maka dari itu, fungsi individuasi merupakan fungsi hakiki dari pendidikan. Adapun individualisasi merujuk pada proses dalam interaksi sosial di mana tingkah laku seseorang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain.

Sikap seperti ini tentu sangat berbahaya dan tidak sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Kedua, fungsi sosialisasi. Inti dari fungsi ini ialah untuk mengembangkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai anak didik asing terhadap sistem nilai dan norma di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Sebab, hal ini akan berdampak pada keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Ketiga, fungsi nasionalisasi. Sebagai konsekuensi hidup berbangsa dan bernegara, sudah sepatutnya setiap anak didik memiliki kecintaan dan rasa nasionalisme yang tinggi.

Keempat, fungsi humanisasi. Ini merupakan fungsi utama dan universal dari pendidikan. Dengan fungsi ini, pendidikan berkewajiban menumbuhkan rasa kebersamaan serta saling menghargai antarsesama. Tidak perlu merisaukan perbedaan warna kulit, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Bahkan pendidikan harus mampu membekali anak didik untuk siap berinteraksi dengan siapa pun dan dari negara mana pun. Dengan demikian, anak didik akan sadar bahwa dirinya hanya bagian kecil dari golongan umat manusia di dunia.

Semoga dengan mengingat kembali beberapa poin dari fungsi pendidikan di atas, dapat menjadi bekal para pendidik dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengakhiri tulisan ini, kita harus mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait PTM seratus persen dengan tetap mengutamakan kesehatan. □

*\*) DS Apandi, SDN 1 Padokan, Kasihan, Bantul.*

## BI FAST: Cepat dan Murah

**AKHIR-AKHIR** ini mungkin Anda terheran-heran ketika akan mentransfer dana menggunakan *mobile banking* ke rekan Anda yang menggunakan bank berbeda, ada pilihan baru selain *transfer online*, yaitu BI FAST. Biayanya transaksi pun hanya Rp2.500. Apa sebenarnya BI Fast ini dan apa bedanya dengan metode transfer online yang selama ini berlaku?

BI Fast yang merupakan kependekan dari Bank Indonesia Fast Payment, adalah infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang baru saja dikenalkan oleh Bank Indonesia kepada para nasabah bank, khususnya untuk pembayaran ritel dan transfer antarnasabah. Layanan ini bersifat efisien, cepat, seketika (*real-time*), dan tersedia setiap saat (24/7). Untuk beberapa bank yang sudah menyediakan layanan BI FAST ini, dapat dilihat di aplikasi *mobile banking*nya, atau di layanan internet banking, bahkan di ATM. Bagi bank yang belum menyediakan layanan BI FAST ini, segera menyediakan layanan baru ini.

### Keunggulan

Ada beberapa keunggulan menggunakan metode transfer BI Fast. Pertama, biayanya murah, hanya Rp 2.500 per transaksi, dibanding dengan biaya transfer cara sebelumnya yang Rp 6.500. Sistem transfer sebelumnya menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Kedua, waktu transfer sangat cepat, maksimal hanya 25 detik. Ketiga, nilai yang dapat ditransfer dengan BI Fast maksimum adalah Rp 250 juta, dibandingkan dengan nilai maksimal kalau transfer melalui transfer online yang maksimal Rp 50 juta – Rp 100 juta atau *real time gross settlement* (RTGS)

### Wing Wahyu Winarno

yang berkisar Rp100 juta – Rp 250 juta.

Keempat, layanan BI Fast sudah tersedia di aplikasi *mobile banking* masing-masing bank, berdekatan dengan metode transfer yang selama ini ada. Sehingga nasabah tidak perlu melakukan penyelesaian yang rumit. Memang belum semua bank sudah menyediakan layanan BI Fast, tetapi Bank Indonesia sudah menargetkan dalam waktu dekat akan terlayani semua. Bank yang belum menyediakan BI Fast, banyak yang sudah selesai menyiapkan diri, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

Kelima, layanan ini bersifat efisien, karena dapat menggunakan *proxy*. Dengan metode ini, nasabah tidak harus menggunakan nomor rekening tujuan, tetapi dapat menggunakan nomor ponsel atau email. Sudah barang tentu, nasabah yang dikirim dana sudah mendaftarkan proksinya, bisa berupa e-mail atau nomor ponselnya. Tentu ini lebih praktis karena biasanya kita sudah menyimpan data mereka di daftar kontak kita di ponsel.

### Ketahanan Sistem

Layanan BI FAST memang menjadi salah satu layanan baru yang diharapkan oleh BI untuk dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional, sehingga dapat tercipta ekosistem yang *integrated, interoperable* dan *interconnected* (3i). Masyarakat pun seka-

rang lebih tenang dan nyaman, karena BI sudah turun tangan untuk menyediakan layanan yang mudah dan menguntungkan.

Selama ini, masyarakat mencoba mengakali mahalnya biaya transfer dengan membayar belanjaan menggunakan transfer melalui lembaga nonbank, misalnya GoPay, ShopeePay, atau aplikasi seperti flip.id, dan sebagainya. Dengan aplikasi tersebut, biaya transfer bahkan bisa gratis.

Terima kasih Bank Indonesia yang selalu mengencankan inovasi-inovasi baru, dan tetap ditunggu inovasi lainnya, misalnya Rupiah digital. □

*\*) Dr Wing Wahyu Winarno MAFIS CA Ak, Dosen STIE YKPN Yogyakarta dan Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Yogyakarta.*

## Pojok KR

DIY kembangkan wisata sehat.  
-- Supaya lekas sehat ekonominya juga.

\*\*\*

Sleman terbitkan Perbup batasi kegiatan anak.  
-- Yang perlu adalah pengawasannya.

\*\*\*

Keputusan PTM untuk PT ditangan Pemda.  
-- Jangan terburu-buru, ketimbang menesal.

*Beraba*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriza Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Musbahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Rochmo Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk23@yahoo.com](mailto:iklankrkyk23@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.